



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

|                  |   |
|------------------|---|
| Tahun Sidang     | : 2019-2020   |
| Masa Persidangan | : I   |
| Rapat Ke         | : 13  |
| Jenis Rapat      | : Rapat Dengar Pendapat   |
| Sifat Rapat      | : Terbuka   |
| Hari, Tanggal    | : Selasa, 19 November 2019  |
| Waktu            | : Pukul 13.00 WIB   |
| Tempat           | : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1<br>Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270   |
| Acara            | : Membahas Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Badan Wakaf<br>Indonesia dan Permasalahan yang dihadapi.  |
| Ketua Rapat      | : <b>H.YANDRI SUSANTO, SPt.</b>   |
| Sekretaris Rapat | : Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  |
| Hadir            | : 1. 37 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI.<br>2. 9 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI IZIN.<br>3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Beserta<br>Jajaran.<br>4. Kepala Badan Wakaf Indonesia (BWI) Beserta jajaran. |

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.33 WIB dan dinyatakan terbuka.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.Ihsan Yunus, BA,B.Comm,ME.Con Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

- d. Menyelenggarakan sosialisasi kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia dalam rangka optimalisasi pengumpulan dana zakat dan peningkatan jumlah wakif serta pembinaan nadzir.
- e. Memperkuat institusi BAZNAS dan BWI agar lebih fokus pada penguatan SDM, digitalisasi program, sosialisasi dan edukasi serta koordinasi atau sinergitas dengan berbagai pihak.
- f. Membangun aplikasi pembayaran zakat dan wakaf untuk memudahkan masyarakat yang ingin membayar zakat dan menyerahkan wakaf.
- g. Menyusun rancang bangun BAZNAS dan BWI untuk lima tahun ke depan termasuk kebutuhannya sehingga akan memudahkan dalam proses penganggaran.
- h. Menyiapkan mekanisme yang memungkinkan setiap umat Islam yang membayar zakat mengurangi kewajiban membayar pajak penghasilan.
- i. Mendorong BWI untuk merencanakan lebih progresif dalam sertifikasi aset-aset wakaf.
- j. Mendorong terbitnya Perpres mengenai zakat penghasilan aparatur negara.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,**



**H.YANDRI SUSANTO, Spt.**

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan agenda, **“Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf serta Permasalahan yang Dihadapi”**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menerima laporan BAZNAS tentang pengelolaan zakat yang meliputi:
  - a. Capaian pengumpulan zakat, infak dan sadaqah oleh BAZNAS tahun 2019 yang diestimasikan sebesar Rp10.065.082.000.000-, (*sepuluh triliun enam puluh lima miliar delapan puluh dua juta rupiah*) atau pertumbuhan sebesar 24 persen.
  - b. Pengelolaan dana dari APBN 2019 sebesar Rp 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah) untuk BAZNAS dalam rangka mendukung koordinasi pengumpulan zakat dari daerah-daerah se-Indonesia yang mencapai Rp 24.000.000.000 (dua puluh empat miliar) per tahun.
  - c. Mendorong revisi Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk optimalisasi zakat.
2. Komisi VIII DPR RI menerima laporan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai:
  - a. Jumlah tanah wakaf yang telah disertifikasi sebanyak 287.160 persil atau sebesar 66,25 persen dari total 435.768 lokasi tanah yang diwakafkan.
  - b. Dana operasional pengelolaan wakaf dari APBN sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar) kumulatif untuk Tahun 2019.
  - c. Mendorong revisi Undang Undang No 41 Tahun 2001 tentang Wakaf.
3. Komisi VIII DPR RI mendorong BAZNAS dan BWI untuk meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan saran dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Melakukan kerja sama dengan unit-unit pembayaran online guna mempermudah pembayaran zakat dan wakaf.
  - b. Mendorong sinergitas pendayagunaan zakat dengan program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah.
  - c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan wakaf dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.